

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Peneliti memanfaatkan pendekatan teori agensi (*Agency Theory*) dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menganalisis hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan, khususnya dalam konteks penghindaran pajak. Pendekatan ini merujuk pada tindakan atau kegiatan individu dan dipandu oleh norma serta situasi di mana interaksi tersebut berlangsung.

Teori agensi menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen dalam pelaksanaan suatu usaha, dengan agen yang diberikan kewenangan untuk proses pengambilan keputusan. Lupia & McCubbins (2000) menjelaskan bahwa pendelegasian wewenang terjadi karena prinsipal membutuhkan pihak lain yang berperan sebagai agen untuk menjalankan kepentingannya. Teori agensi berasumsi bahwa setiap individu pada dasarnya termotivasi oleh kepentingan pribadi, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Berdasarkan asumsi teori ini, hubungan antara prinsipal dan agen pada hakikatnya dianggap sulit tercipta, karena terdapat perbedaan kepentingan yang berlawanan di antara kedua belah pihak.

Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak agen dan prinsipal dapat menimbulkan adanya masalah keagenan atau *agency problem* (Zogning, 2017). Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dalam hal ini digambarkan pada konteks hubungan pemerintah sebagai pihak prinsipal dan perusahaan atau wajib

pajak sebagai agen. Dalam hal ini pemerintah memiliki harapan untuk memperoleh penerimaan pajak yang sebanding dengan laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Namun, di sisi lain, perusahaan sebagai agen memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi nilai laba perusahaan sehingga perusahaan berupaya agar dapat membayar pajak seminimal mungkin sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak berkurang.

Menurut Lupia & McCubbins (1994), dalam hubungan agensi, pihak legislatif mendelegasikan kekuasaan yang dimilikinya kepada pihak eksekutif sebagai *expert agent* untuk menjalankan tujuan yang diinginkan oleh legislatif. Pemerintah sebagai pihak yang bertindak sebagai pemberi wewenang, dan perusahaan yang berperan sebagai *expert agent*. Fiskus memberikan kewenangan kepada wajib pajak badan untuk secara mandiri menghitung, melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya, dengan harapan bahwa pelaksanaannya akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pendelegasian ini membuka peluang bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut melalui tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Hal ini disebabkan oleh cara pandang agen yang melihat pajak sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga muncul insentif bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam regulasi demi menekan beban pajak yang harus mereka bayar.

Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak melalui berbagai strategi yang berkaitan dengan karakteristik keuangannya. Perusahaan melakukan penyusutan aset tetap untuk menekan penghasilan kena pajak. Selain itu, skala

perusahaan juga berperan, karena perusahaan berskala besar memiliki akses terhadap sumber daya dan kemampuan menyusun perencanaan pajak yang lebih kompleks. Penggunaan utang pun dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak melalui pengakuan bunga sebagai biaya. Ketiga variabel tersebut menjadi indikator penting dalam memahami praktik penghindaran pajak. Dengan demikian intensitas modal, besaran perusahaan dan *leverage* dapat menjadi indikator penting dalam memahami praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mempengaruhi besarnya kewajiban perpajakan, baik melalui cara-cara yang masih dalam batas ketentuan Undang-Undang Perpajakan maupun melalui strategi yang sengaja dirancang untuk menekan beban pajak yang harus dibayar, guna memperoleh keuntungan finansial yang lebih maksimal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Wisnu & Yuniarwati, 2023)

Perusahaan memiliki dua opsi untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Opsi pertama, mereka dapat menurunkan kewajiban pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan melalui praktik penghindaran pajak. Opsi lain, mereka bisa mengurangi kewajiban pajak mereka dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum perpajakan, seperti penggelapan pajak (Septian *et al.*, 2024)

Penghindaran pajak terjadi dikarenakan banyaknya Wajib Pajak, baik pribadi maupun perusahaan merasa terbebani oleh kewajiban pajak yang wajib dibayarkan. Namun, jika praktik ini dilakukan dengan tujuan dan niat yang baik,

yaitu untuk menghemat atau mengurangi pajak dan tetap mematuhi undang-undang perpajakan yang sah, itu adalah tindakan legal. Dalam konteks ini, penghindaran pajak diterapkan dengan cara meminimalkan beban pajak melalui berbagai strategi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penghindaran pajak dalam suatu perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. *Effective Tax Rate (ETR)*

Effective Tax Rate (ETR) mencerminkan dampak kumulatif dari perubahan tarif pajak serta insentif pajak yang diterapkan oleh suatu perusahaan. ETR dihitung dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan total beban pajak yang ditanggung perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Perusahaan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Book Tax Difference (BTD)*

Book Tax Difference (BTD) adalah selisih antara laba kena pajak dan laba komersial, yang dapat mencerminkan informasi terkait kinerja masa mendatang sebagaimana tercermin dalam kualitas laba. Selain faktor perpajakan, perbedaan ini dipengaruhi oleh praktik manajemen pajak, manajemen laba, serta variasi dalam penerapan ketentuan akuntansi berkontribusi terhadap perbedaan pembukuan pajak.

$$BTD = \frac{\text{Laba Komersial} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

3. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

Cash Effective Tax Rate (CETR) dihitung dengan pajak yang setorkan dalam bentuk kas terhadap laba sebelum terkena pajak. CETR memberikan gambaran yang lebih akurat tentang seberapa besar pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan dalam bentuk tunai, dibandingkan dengan kewajiban pajak yang dilaporkan.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Effective Tax Rate (ETR) dipilih sebagai metode untuk menghitung penghindaran pajak perusahaan dalam penelitian ini. Pengukuran ETR ini didasarkan pada kemampuannya dalam mencerminkan perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi (Widati et al., 2024). ETR dipandang sebagai indikator yang komprehensif karena mampu merepresentasikan seluruh beban pajak yang ditanggung perusahaan, termasuk pajak final dan pajak tangguhan. Hal ini penting mengingat praktik penghindaran pajak tidak hanya terbatas pada pajak penghasilan, melainkan juga dapat mencakup berbagai jenis pajak lain yang menjadi kewajiban perusahaan.

2.1.3 **Intensitas Modal**

Maulana et al., (2023) menjelaskan bahwa intensitas modal merujuk pada tingkat investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk persediaan dan aset tetap. Rasio ini mencerminkan seberapa banyak perusahaan mengalokasikan dananya untuk aset tetap. Secara umum, hampir keseluruhan aset tetap mengalami penyusutan, yang dicatat sebagai biaya yang dapat menekan pendapatan pajak di

laporan keuangan. Penyusutan ini langsung berdampak pada laba perusahaan, yang digunakan untuk menghitung pajak. Oleh karena itu, ketika biaya penyusutan semakin meningkat, total pajak yang perlu dibayar perusahaan semakin rendah.

Semakin tinggi tingkat rasio intensitas modal ini, semakin meningkat perusahaan kemungkinan terlibat di aktivitas penghindaran pajak. Aset tetap menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan dapat mengalami depresiasi, yang dapat menekan laba dikenakan pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar.

2.1.4 Besaran Perusahaan

Besaran perusahaan merujuk pada besar kecilnya perusahaan yang diukur berdasarkan total asetnya, dengan menggunakan nilai logaritma total aset sebagai indikator. Semakin besar suatu perusahaan, semakin rumit transaksi yang harus dilakukan, sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan guna melakukan tindakan penghindaran pajak pada setiap transaksi (Putri *et al.*, 2021).

Menurut Saifudin dan Yunanda (2016), besaran perusahaan mengacu pada skala yang digunakan dalam mengelompokkan suatu entitas sebagai perusahaan kecil, menengah, atau besar. Penentuan besaran perusahaan dapat didasarkan pada berbagai indikator seperti nilai ekuitas, volume penjualan, jumlah karyawan, total aset, serta faktor lainnya. Secara umum, perusahaan dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu perusahaan kecil, menengah, dan besar.

Hubungan besaran perusahaan dengan penghindaran pajak adalah berasal dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang melimpah untuk mendukung berbagai

kebutuhan operasionalnya. Pemilik modal di perusahaan besar biasanya mengharapkan laba yang optimal, sehingga manajer akan berupaya menggunakan strategi penghindaran pajak sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan.

Besaran perusahaan diproksikan dengan mentransformasikan total aset ke dalam Log Natural (Ln). Karena nilai total aset cukup besar, transformasi ini menyederhanakan angka tanpa mengubah proporsi sebenarnya dari jumlah aset.

2.1.5 *Leverage*

Leverage adalah suatu rasio yang mengindikasikan pemanfaatan utang perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Rasio *leverage* menunjukkan korelasi antara total aset dan ekuitas pemegang saham, serta memberikan gambaran mengenai sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan eksternal dalam bentuk utang untuk mendukung kinerja keuangannya. Suatu bisnis dapat menurunkan laba kena pajaknya dengan mengurangi pembayaran bunga dari laba sebelum pajaknya (Abidin & Adelina, 2022).

Ada beberapa jenis rasio pengukuran *leverage*, yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Debt to Asset Ratio (DAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya proporsi aset perusahaan yang didanai melalui utang. Adapun rumus untuk menghitung *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas pada suatu perusahaan. Rasio ini akan menggambarkan seberapa besar bagian modal perusahaan yang akan digunakan sebagai jaminan utang. Rumus *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang jangka panjang dengan total ekuitas pada suatu perusahaan. Rasio ini akan menggambarkan seberapa besar bagian modal perusahaan yang akan digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang. Rumus *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)* adalah sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4. *Times Interest Earned Ratio (TIER)*

Times Interest Earned Ratio (TIER) merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga. Rumus *Times Interest Earned Ratio (TIER)* adalah sebagai berikut:

$$\text{TIER} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

Debt to Equity Ratio digunakan sebagai indikator penelitian karena DER mencerminkan perbandingan antara total utang dan total ekuitas dalam struktur modal perusahaan, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat perusahaan mengandalkan utang dalam kegiatan operasionalnya.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji dampak dari variabel-variabel dalam penelitian ini terhadap penghindaran pajak. Rincian lebih lanjut mengenai beberapa penelitian terdahulu dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Erlisa <i>et al.</i> , (2024)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Besaran Perusahaan	Variabel Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , Variabel <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> Sementara itu Variabel Besaran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Yasmin & Andini (2024)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen : Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba, Besaran Perusahaan	Variabel intensitas modal berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan Variabel <i>leverage</i> , manajemen laba, dan besaran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

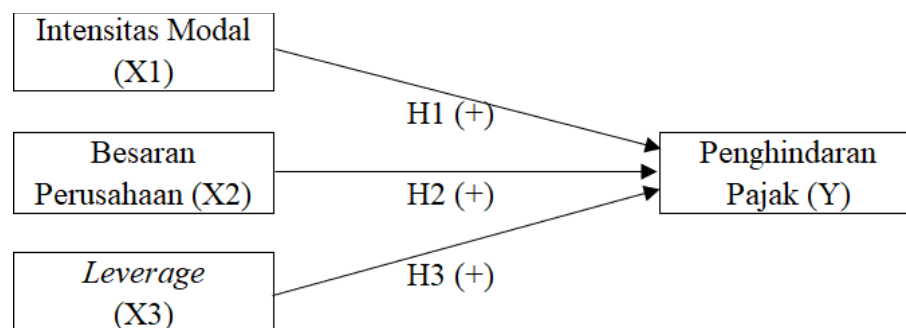
No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Yulianti & Yulianti (2024)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Besaran Perusahaan	Variabel <i>leverage</i> , intensitas modal dan besaran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , namun variabel profitabilitas menunjukkan pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Dwi Yadnye & Mayangsari (2023)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen: Profitabilitas, Besaran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal	Variabel besaran perusahaan dan intensitas modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Paramita <i>et al.</i> , (2023)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen : <i>Leverage</i> , <i>Return on Assets</i> , Besaran Perusahaan	Variabel <i>Return on Assets</i> dan besaran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu variabel <i>leverage</i> berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Benedikta Olgaviani Don (2023)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> , besaran perusahaan, intensitas modal	Variabel besaran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu variabel <i>thin capitalization</i> dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
7.	Mahdiana & Amin (2020)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen: Profitabilitas, <i>leverage</i> , besaran perusahaan, <i>sales growth</i> .	Variabel profitabilitas dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel besaran perusahaan dan <i>sales growth</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Prawati & Hutagalung (2020)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen : Intensitas modal, karakteristik eksekutif, <i>sales growth</i>	Variabel intensitas modal dan karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Mustikasari (2020)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Independen : Intensitas aset tetap, <i>leverage</i> , profitabilitas, pertumbuhan penjualan	Variabel intensitas aset tetap tidak mempengaruhi <i>tax avoidance</i> , sedangkan variabel <i>leverage</i> Berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Bandaro & Ariyanto (2020)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen: Profitabilitas, besaran perusahaan, <i>leverage</i> , kepemilikan manajerial, intensitas modal.	Variabel profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan variabel besaran perusahaan, <i>leverage</i> , kepemilikan manajerial dan intensitas modal tidak mempengaruhi <i>tax avoidance</i> .
11.	Solihin <i>et al.</i> , (2020)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen: Intensitas modal, besaran perusahaan, <i>leverage</i>	Variabel intensitas modal berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> dan variabel <i>leverage</i> Berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel besaran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori serta diperkuat oleh temuan berbagai penelitian terdahulu, penghindaran pajak ditetapkan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Di sisi lain, intensitas modal, besaran perusahaan dan *leverage* berperan sebagai variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. Dengan merujuk pada hubungan antar variabel tersebut, maka kerangka pemikiran teoritis disusun dan divisualisasikan dalam bentuk diagram sistematis sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak

Persentase aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan disebut intensitas modal. Intensitas modal yaitu merujuk pada tingkat investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk persediaan dan aset tetap. Rasio ini digunakan untuk menentukan seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk

menghasilkan laba. Dalam praktiknya, perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban atau biaya politik yang dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mendanai ekspansi usaha.

Menurut SAK 16, aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap akan mengalami depresiasi atau penyusutan karena penggunaannya, dan biaya penyusutan tersebut dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Semakin banyak kepemilikan aset tetap, maka semakin besar pula potensi pengurangan pajak yang dapat dimanfaatkan perusahaan.

Dalam hubungan keagenan, manajemen memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan termasuk dalam hal pengelolaan pajak perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa agen cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atau kepentingan internal perusahaan, meskipun hal tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Salah satu bentuk tindakan oportunistik manajemen perusahaan sebagai agen adalah dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Manajemen akan melakukan investasi dalam aset tetap dengan menggunakan dana yang tidak terpakai (*idle funds*) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya penyusutan yang berguna sebagai pengurang pajak (Malik *et al.*, 2022). Strategi ini menjadi salah satu bentuk

penghindaran pajak yang legal dan sering digunakan dalam perencanaan pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian Purwaningsih & Mardiana (2023) disimpulkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak demi memaksimalkan laba perusahaan. Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap, yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan guna mengurangi penghasilan kena pajak. Melalui penyusutan tersebut, perusahaan dapat menurunkan kewajiban perpajakan secara legal. Namun, perlu diperhatikan bahwa kepemilikan aset tetap yang terlalu besar juga dapat meningkatkan beban penyusutan, yang berpotensi menurunkan laba secara keseluruhan. Merujuk pada penjelasan dan temuan dari penelitian sebelumnya, hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H1 : Intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh besaran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Menurut Muchlisin Riadi (2021), besaran perusahaan merupakan suatu indikator atau skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil. Pengukuran ini umumnya didasarkan pada beberapa variabel seperti total aset, *log size*, nilai penjualan, atau jumlah karyawan. Salah satu indikator yang paling sering digunakan adalah total aset, karena dianggap mampu merepresentasikan kemampuan ekonomi dan operasional

perusahaan secara menyeluruh. Semakin besar total aset yang dimiliki, maka semakin besar pula perusahaan tersebut dalam hal sumber daya dan kapasitas operasional.

Dalam perspektif teori agensi, besaran perusahaan menjadi faktor yang memperkuat dinamika konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan yang memiliki skala besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk tenaga ahli di bidang perpajakan serta sistem keuangan yang kompleks, sehingga berpotensi lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak secara legal. Selain itu, perusahaan besar juga cenderung memiliki asimetri informasi yang lebih tinggi terhadap pemerintah, sehingga mempersulit otoritas pajak dalam mengawasi sepenuhnya aktivitas perpajakan mereka.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Muid (2019), besaran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, yang sejalan dengan meningkatnya intensitas aktivitas bisnis. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil umumnya menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah

H2: Besaran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

Leverage merupakan pemanfaatan utang oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Penggunaan utang, terutama utang jangka panjang, dapat memberikan keuntungan dalam bentuk penghematan pajak melalui

beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Tingginya tingkat *leverage* suatu perusahaan menunjukkan tingginya proporsi pembiayaan yang berasal dari utang, yang secara langsung berkorelasi dengan meningkatnya beban bunga. Peningkatan beban bunga tersebut akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga secara otomatis mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan memanfaatkan insentif pajak berupa pengurang atas biaya bunga, perusahaan dapat menggunakan strategi pembiayaan berbasis utang sebagai sarana untuk efisiensi pajak. Akibatnya, manajemen dapat membiayai proyek-proyek eksternal tanpa meningkatkan laba secara signifikan, karena tingginya biaya bunga mampu menekan beban pajak yang ditanggung perusahaan (Agustina *et al.*, 2023).

Dalam konteks teori agensi, menyoroti adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemerintah. Manajemen sebagai agen cenderung memanfaatkan utang untuk menurunkan beban pajak melalui pengurangan penghasilan kena pajak dari biaya bunga. Sementara itu, pemerintah sebagai prinsipal berkepentingan untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal. Perbedaan kepentingan ini menciptakan potensi konflik. Potensi konflik yang dimaksud ini adalah *leverage* digunakan sebagai sarana penghindaran pajak yang legal namun dapat mengurangi efektivitas penerimaan pajak negara.

Pernyataan tersebut sependapat dengan studi dari Mustikasari (2020), Mahdiana & Amin (2020) dan Afianti *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. Oleh karena itu, menurut penuturan dan temuan terdahulu di atas, dirumuskan hipotesis dalam

penelitian dibawah ini:

H3: *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.